

**Implementasi Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di
Kelurahan Senggarang Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2017-2018**

Muhammad Reyhanoldra, Dian Prima Safitri, Edison

Email : resopus@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Senggarang Kecamatan Tanjungpinang Kota tahun 2017-2018 bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan air minum untuk wilayah yang tidak teraliri PDAM. Sesuai dengan identifikasi masalah dimana Implementasi Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengalami masalah yaitu tidak semua rumah dapat teraliri air minum dari sumber tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa implementasi program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi oleh Edward III dengan menggunakan empat tolak ukur dari teori ini yaitu : a. Komunikasi b. Sumber Daya c. Disposisi d. Struktur Birokrasi. Informan dalam penelitian ini terdapat 6 informan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah sesuai dengan analisis menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III dari tolak ukur yang pertama yaitu komunikasi antara pelaksana program dengan penerima manfaat sudah berjalan namun tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Dari tolak ukur yang kedua yaitu sumber daya masih ada kendala yaitu belum ditunjukannya bendahara dan masih kurangnya unit air baku. Tolak ukur yang ketiga yaitu disposisi terkait sikap pelaksana program berjalan maksimal dan tidak ada kendala. Dan didalam tolak ukur yang keempat yaitu struktur birokrasi seperti SOPnya juga menjadi kendala karena belum maksimalnya pelaksanaan tersebut.

Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Senggarang Kecamatan Tanjungpinang Kota tahun 2017-2018 berjalan maksimal walaupun masih terjadi sedikit hambatan untuk melaksanakan program SPAM tersebut seperti kurangnya debit air sehingga belum cukup untuk dialiri ke semua rumah tanpa harus dilakukan penggiliran atau sistem buka tutup kran. Selanjutnya ada kewajiban-kewajiban yang belum secara maksimal dijalankan oleh penyelenggara program dalam hal ini UPTD SPAM terkait belum ditunjuknya bendahara dan belum maksimalnya pelaksanaan program ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan program SPAM.

Kata kunci : Pelaksanaan, Sistem Penyediaan Air Minum.

ABSTRACT

The Drinking Water Supply System (SPAM) Program in Senggarang Village, Tanjungpinang Kota District in 2017-2018 aims to meet the need for drinking water for areas that are not drained by PDAMs. In accordance with the identification of problems where the Implementation of the Drinking Water Supply System (SPAM) program has a problem that is not all houses can get drinking water from these sources. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Drinking Water Supply System (SPAM) program.

The theory used in this study is the theory of implementation by Edward III by using four benchmarks of this theory, namely: a. Communication b. Resources c. Disposition d. Bureaucratic Structure. There are 6 informants in this study according to the need to answer the research results. The data analysis technique used in this study was a descriptive technical analysis with a qualitative approach.

The results of this study are in accordance with the analysis using implementation theory proposed by Edward III from the first benchmark, namely communication between program implementers and beneficiaries has been running but not carried out on an ongoing basis. From the second benchmark, there are still constraints on resources, namely treasurer and lack of raw water. The third yardstick is the disposition related to the attitude of program implementers running optimally and there are no obstacles. And in the fourth yardstick, bureaucratic structures such as SOPs are also an obstacle because the implementation has not been maximized.

The Drinking Water Supply System (SPAM) program in Senggarang Sub-district, Tanjungpinang Kota District in 2017-2018 runs optimally although there are still a few obstacles to implement the SPAM program such as lack of water discharge so that it is not enough to be flowed to all houses without having to rotate or open and close the system faucet. Furthermore, there are obligations that have not been maximally carried out by the program organizers, in this case the UPTD SPAM related to the appointment of the treasurer and the non-maximum implementation of this program in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia number 122 of 2015 as a guideline for the implementation of the SPAM program.

Keywords: Implementation, Drinking Water Supply System.

A. PENDAHULUAN

Disetiap Kota/ Kabupaten biasanya mempunyai sebuah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di daerahnya masing-masing. Sama halnya di Kota Tanjungpinang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri merupakan sebuah perusahaan yang memiliki wewenang dalam penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Tanjungpinang. Tetapi pada kenyataannya, Perusahaan tersebut belum mampu menyediakan kebutuhan air secara menyeluruh. Salah satu daerah yang kebutuhan air bersihnya belum tersalurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri adalah di Kelurahan Senggarang yang terletak di Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang. Didaerah ini sangat minim dan hampir tidak tersentuh pembangunan, termasuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan umum yang layak, sumber air yang memadai, jembatan/ pelantar yang layak digunakan, dll. Fasilitas umum yang seharusnya menjadi hak masyarakat dan mudah diakses, pada kenyataannya sangat sulit untuk mereka dapatkan.

Keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dengan tidak memandang kaya atau miskin, tua maupun muda merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari diri individu setiap orang. Semua lapisan menginginkan diberi pelayanan yang diberikan terbaik. Pelayanan publik pada dasarnya diberikan melalui beberapa organisasi birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintahlah yang memiliki hak untuk memonopoli atau menyediakan barang atau jasa publik kepada setiap warga negara mulai dari seorang warga Negara itu lahir sampai akhir hayatnya.

Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang pernah merespon masalah kelangkaan air bersih dengan programnya yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Lokasi penyelenggaraan program ini juga dilakukan di wilayah yang tidak terjangkau oleh PDAM Tirta Kepri yaitu Kampung Bugis, Batu Sembilan, Sungai Ladi, Kampung Bulang dan Kelurahan Senggarang. Di Kelurahan Senggarang sendiri jumlah penerima program sebanyak 451 rumah dengan 473 Kepala Keluarga, 5 orang Badan Pengelolaan Air Minum, dengan iuran yang dikenakan kepada penerima manfaat sebesar lima ribu rupiah per kubik. Namun yang terjadi dilapangan, semua infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ini belum beroperasi secara maksimal dan tidak semua warga Kelurahan Senggarang bisa menikmati layanan air dari sumber tersebut. Padahal fasilitas yang dibangun dinilai sudah lengkap dan layak untuk dijalankan karena sudah ada saluran perpipaan kerumah-rumah warga serta meteran disetiap rumah warga dan juga alat-alat pendukung lainnya.

Berangkat dari permasalahan yang ada, mendorong peneliti untuk mengetahui implementasi program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota tahun 2017-2018 yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

B. BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti hanya menguraikan dan menjelaskan penelitian sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa menghubungkan atau mengkaitkan terhadap unsur-unsur yang lain dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2012:14) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Peneliti ingin menggali data dan informasi tentang proses implementasi program sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota tahun 2017-2018.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dan Kelurahan Senggarang. Lokasi ini di pilih oleh peneliti karena instansi tersebut yang berhubungan langsung dengan objek yang akan di teliti. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara langsung kepada *informan* selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik observasi yakni pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang menjadi objek penulisan dan mencatat segala gejala-gejala yang diperlukan sebagai acuan yang berkesan dengan topik penulisan.

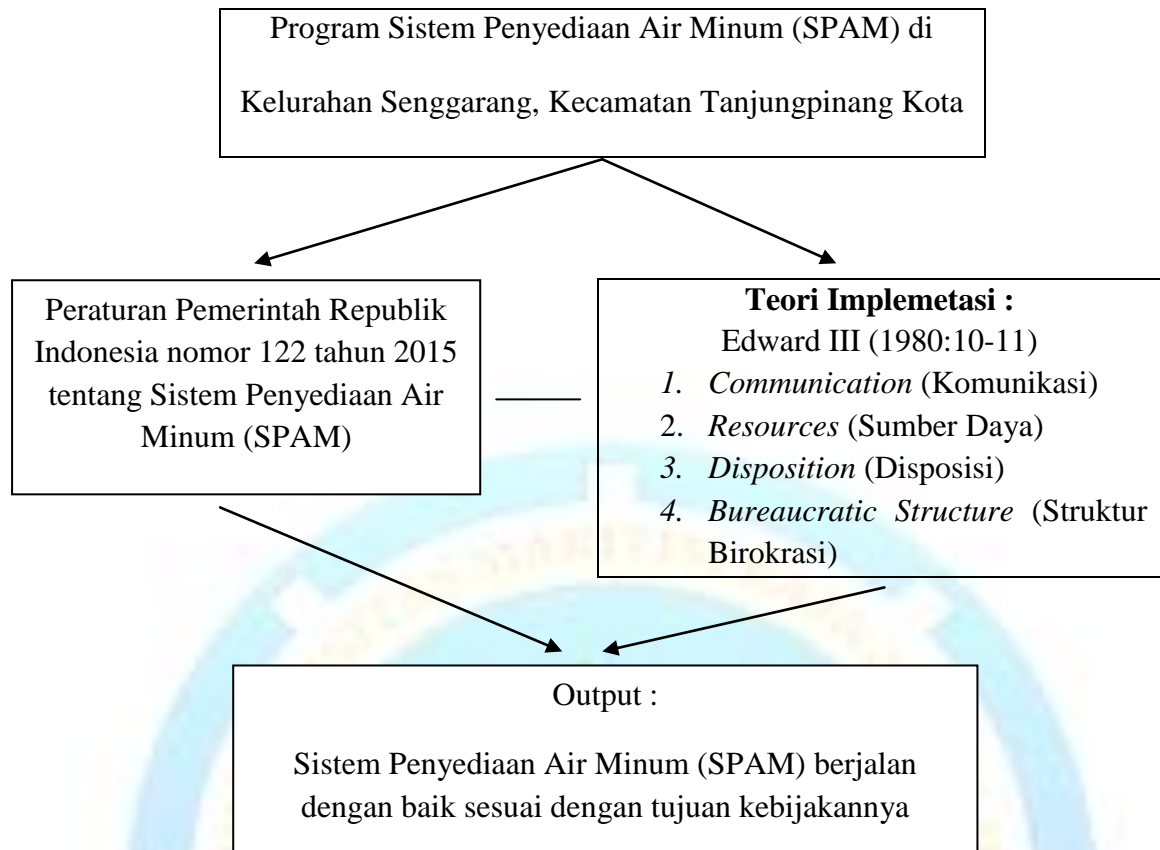
Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel melainkan *Informan*. Penentuan *Informan* sebagai sumber data dilakukan dengan teknik *purposive*. Sugiyono (2009:216) menyebutkan *purposive* adalah penentuan sumber data yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Untuk memperoleh data, peneliti menentukan beberapa orang *informan* yang terdiri dari : 1 orang pegawai dari

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yang membidangi masalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai *informan* kunci, 1 orang Badan Pengelolaan Air Minum (BAPELAM), 1 orang Pegawai dari Kelurahan Senggarang dan beberapa orang Masyarakat asli dari Kelurahan Senggarang.

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resources* melalui wawancara dan observasi. Namun, ada sumber lain seperti dokumen berupa peraturan pemerintah, buku, foto-foto, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk wawancara, hasil observasi serta data dokumentasi lapangan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut ditampilkan sesuai dengan indikator-indikator yang dipaparkan oleh Edward III sehingga diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Adapun indikator-indikator dalam model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.



1. Komunikasi

Komunikasi menurut Edward III (Agustino, 2012:149) sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Komunikasi yang terjadi dilapangan terkait masalah Sistem Penyediaan Air Minum belum bisa dikatakan maksimal pelaksanaannya karena belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Ada beberapa yang menjadi catatan peneliti terkait komunikasi dalam pelaksanaan program SPAM ini. Pertama, Sosialisasi yang hanya dilakukan pada saat awal terbentuknya Program dan tidak dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Kedua, Kurangnya evaluasi dari UPTD SPAM

terhadap pelaksanaan yang dilakukan badan pengelola dilapangan dibuktikan dengan tidak adanya jadwal tetap kapan UPTD SPAM ini melakukan evaluasi. Evaluasi baru akan dilakukan UPTD SPAM apabila ada keluhan dari badan pengelola atau dari masyarakat dalam hal ini bisa disebut sebagai pelanggan.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III, Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan agar memenuhi semua kebutuhan untuk mencapai semua keberhasilan implementasi tentu saja dibutuhkan sumber daya baik itu tenaga dan sumber daya lainnya.

Sumber daya yang terjadi dilapangan terkait staf belum maksimal karena UPTD SPAM sampai hari ini belum membentuk atau menunjuk seorang bendahara yang dirasa cukup penting agar program ini bisa berjalan lebih efektif. Selanjutnya terkait Fasilitas, peneliti melihat fasilitas yang ada dan digunakan dalam pelaksanaan program ini sudah sangat lengkap, disetiap rumah sudah terpasang meteran yang berguna untuk mengukur penggunaan. Dilokasi berdirinya bangunan SPAM juga terdapat mesin mesin besar yang difungsikan untuk mengaliri air kerumah-rumah warga. Namun sumber air yang menjadi masalah di SPAM Kelurahan Senggarang ini, Debit air yang kecil membuat petugas dilapangan harus pintar membuat penggiliran atau sistem buka-tutup kran.

3. Disposisi

Menurut Edward III, kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan

apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan.

Variabel Disposisi ini juga menentukan keberhasilan perjalanan implementasi yang dimana para pelayanan publik ikut andil dalam menjalankan roda administrasi, dan para pelayanan publik harus mengerti dengan apa yang mereka laksanakan, karena jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui cara melaksananya, tetapi juga harus mempunyai sikap pelayan yang baik sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Disposisi yang terjadi dilapangan terkait sikap pelaksana program sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pelayanan yang dilakukan BAPELAM dinilai baik oleh masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (Agustino, 2012:153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Struktur birokrasi yang terjadi dilapangan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dilakukan secara maksimal, karena belum semua kewajiban BLUD UPTD SPAM yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 tahun 2015 sebagai acuan terlaksana dengan baik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diperoleh sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini yaitu Implementasi Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Senggarang Kecamatan Tanjungpinang Kota tahun 2017-2018 sudah dilakukan walaupun masih terjadi hambatan dalam melaksanakan program SPAM tersebut seperti kurangnya debit air sehingga belum cukup untuk dialiri kesemua rumah tanpa harus dilakukan penggiliran atau sistem buka tutup kran.

Selanjutnya ada kewajiban-kewajiban yang belum secara maksimal dijalankan oleh penyelenggara program dalam hal ini UPTD SPAM terkait ketersediaan unit air baku. UPTD SPAM harus menjamin pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan serta berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup yang saat ini belum terlaksana di Badan Layanan Umum Daerah UPTD SPAM.

Dari beberapa indikator dalam teori yang digunakan, dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Dari tolak ukur yang pertama yaitu komunikasi. Dapat disimpulkan dari pembahasan dalam penelitian ini bahwa Komunikasi sudah dilakukan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dan Kelurahan senggarang sudah melakukan sosialisasi dalam bentuk pertemuan yang didalamnya dihadiri perangkat RT/RW dan tokoh masyarakat. Namun hal ini tidak dilakukan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dalam hal ini sebagai pelanggan tidak dapat menyalurkan

aspirasi mereka terkait pelaksanaan Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

2. Dari tolak ukur yang kedua yaitu sumber daya. Dapat disimpulkan dari pembahasan dalam penelitian ini bahwa sumber daya terbagi menjadi dua bagian yaitu Staf dan fasilitas. Hal yang terjadi dilapangan terdapat tiga orang badan pengelola air minum yang ditugaskan untuk mengelola program SPAM ini, namun UPTD SPAM sampai hari ini belum membentuk atau menunjuk seorang bendahara yang dirasa cukup penting agar program ini bisa berjalan lebih efektif. Selanjutnya terkait Fasilitas, peneliti melihat fasilitas yang ada dan digunakan dalam pelaksanaan program ini sangat lengkap, disetiap rumah sudah terpasang meteran yang berguna untuk mengukur penggunaan air. Dilokasi berdirinya bangunan SPAM juga terdapat mesin mesin besar yang difungsikan untuk mengaliri air kerumah-rumah warga. Namun sumber air yang menjadi masalah di SPAM Kelurahan Senggarang ini, Debit air yang kecil membuat petugas dilapangan harus pintar membuat penggiliran atau sistem buka-tutup kran.
3. Tolak ukur yang ketiga yaitu Disposisi. Dapat disimpulkan bahwa pelaksana program ini tidak mempunyai kendala terkait sikap dari pelaksana program, hal ini dibuktikan dengan sikap pelaksana pelayanan yang dilakukan BAPELAM dengan baik berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan.
4. Struktur birokrasi merupakan tolak ukur yang keempat dalam teori yang digunakan dipenelitian ini dan kesimpulan yang dapat diambil adalah belum maksimalnya melakukan kewajiban BLUD UPTD SPAM yang

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 tahun 2015 sebagai acuan.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung; Alfabeta
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, C George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC; Congressional Quartely Inc
- Nugroho, Rian D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta; PT. Elex Media Komputindo
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung; Remaja Rosdakarya Offset
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung; Alfabeta
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung; Alfabeta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jogjakarta; CAPS
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

2. Jurnal-jurnal

Naskah Publikasi. Pelaksanaan Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2017

Naskah Publikasi. Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2014 – 2016

Naskah Publikasi. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 (Studi di Desa Pakuan Ratu dan Desa Sriwijaya)

Naskah Publikasi. Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Cileces Kecamatan Jatinangor Sumedang

Naskah Publikasi. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo

3. Undang-undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum